

BAB IV

POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DI METROPOLITAN BANDUNG

Seperti diuraikan pada bab selanjutnya bahwa *karakteristik* dari pembangunan berkelanjutan adalah adanya hal-hal berikut :

- Keterbaharuan (*Renewability*) :
- Substitusi : Apa bila dimungkinkan, setiap komunitas harus dapat menggunakan sumber daya terbarui untuk menggantikan sumber daya yang tidak terbarui (*non renewable resources*).
- Interdependensi /Saling ketergantungan
- Kemampuan beradaptasi (*Adaptibility*) :
- Komitmen Institusi

Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi bagaimana pembangunan dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan, khususnya manusia, tanpa mengakibatkan kerusakan alam, dengan kata lain pembangunan berkelanjutan harus selalu berpatokan pada tiga hal yaitu *perbaikan ekonomi*, peningkatan *kualitas sosial* dan *konservasi lingkungan* untuk dimensi waktu sekarang dan masa akan datang.

Pengelolaan sampah, khususnya di perkotaan, memerlukan konsep pembangunan berkelanjutan dengan kriteria-kriteria di atas sehingga akan menghasilkan suatu konsep pengelolaan dimana sampah yang selama ini diketahui selalu dalam konotasi negatif : bau, kotor, merusak lingkungan, menurunkan harga lahan yang ada disekitar lokasi pengelolaan sampah, dapat menjadi pengelolaan sampah yang menguntungkan dari segi ekonomi, dapat berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan tanpa merusak lingkungan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa potensi dan masalah dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan bidang pengelolaan sampah di Metropolitan Bandung. Telaahan ini sangat sederhana, mengingat keterbatasan waktu, sehingga data-data yang diperoleh hanyalah data-data sekunder.

4.1 Potensi

Sebagai daerah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Profinsi Jawa Barat (RTRWP) sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), kawasan metropolitan Bandung mempunyai potensi yang cukup besar, baik segi sumber daya manusia maupun dari segi ekonomi. Kawasan Metropolitan Bandung juga dikenal sebagai kawasan yang dari segi pemasaran adalah pasar yang sangat besar dengan berbagai kegiatan ekonomi ada di dalamnya. Sebagai contoh, kawasan inti dari Metropolitan Bandung, yaitu kota Bandung adalah merupakan pusat kegiatan jasa, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung di dominasi oleh Industri, sedangkan Kabupaten Garut dan Kabupaten sumedang selain kegiatan pertanian juga dikenal sebagai pusat kerajinan dan makanan khas.

Berikut adalah beberapa potensi Kawasan metropolitan Bandung dikaitkan dengan kemungkinan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan bidang pengelolaan sampah.

4.1.1 Potensi Sumber Daya Manusia dikaitkan Teknologi Pengelolaan Sampah.

Kawasan Metropolitan Bandung dapat dikatakan sebagai kawasan termaju di Jawa Barat di bidang pengembangan Teknologi. Beberapa pusat penelitian dan perguruan tinggi ternama terdapat di kawasan itu, khususnya di Kota Bandung, diantaranya : Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan, Pusat Penelitian Geologi Teknik dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air. Selain itu terdapat pula lembaga swadaya masyarakat yang sangat peduli kepada masalah sampah dan masalah lingkungan, seperti LSM Katiga , DPKLTS (dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda).

Peran Universitas, Pusat penelitian dan Lembaga sosial Masyarakat dalam merumuskan teknologi pengelolaan sampah dirasakan akan penting dalam upaya pengelolaan persampahan di perkotaan. Hasil kajian dari lembaga tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelola bidang persampahan. Beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh lembaga tersebut diantaranya :

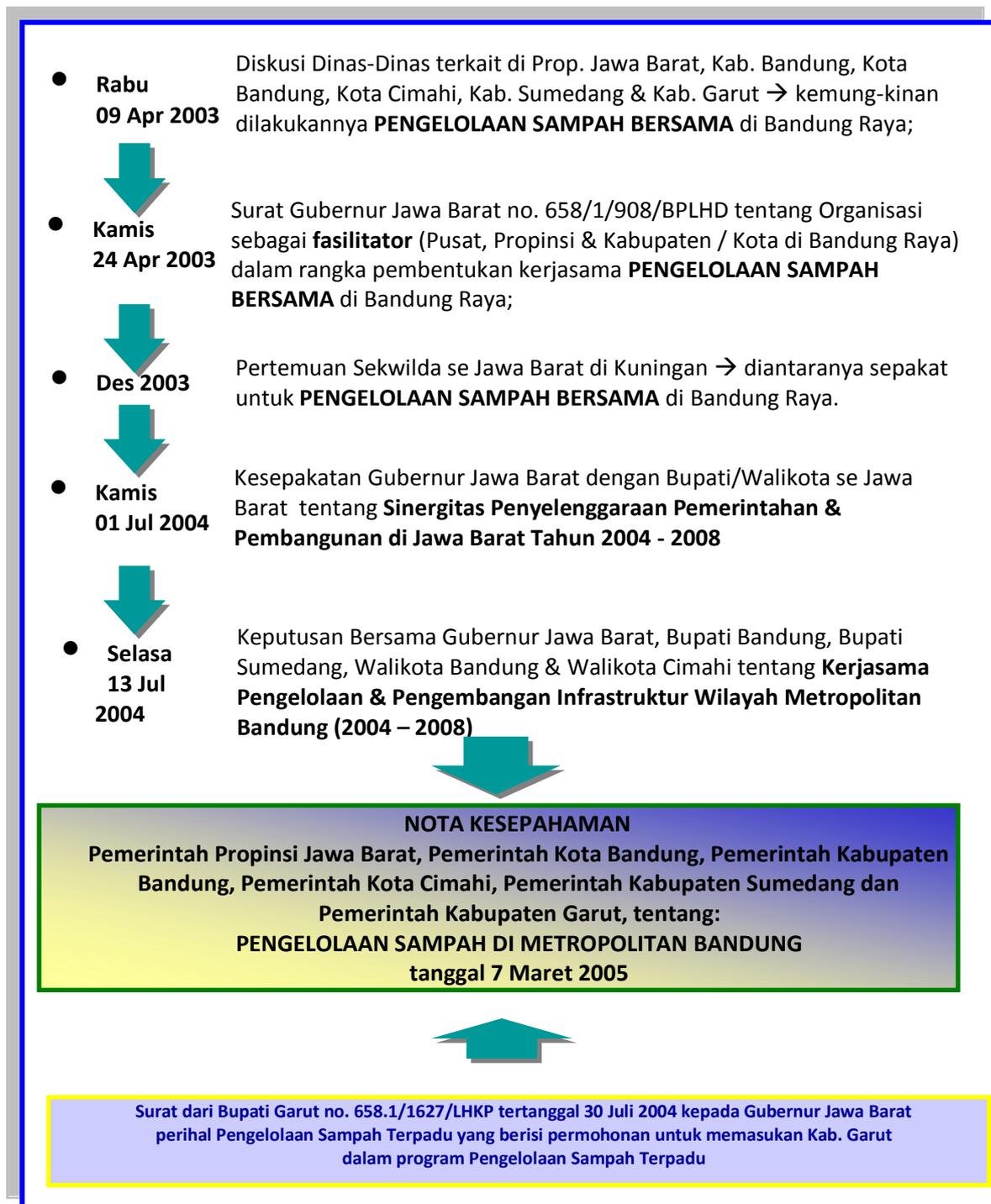
- Kajian pemanfaatan Gas *Methane* dari TPA Leuwigajah yang dilakukan oleh ITB
- Kajian Pemanfaatan Kompos dan sistem Pengelolaan Sampah Terpadu oleh LPM Universitas Padjajaran.
- Pelatihan kelompok masyarakat pengelola sampah oleh UNPAS dan ITENAS.
- Pelatihan Daur Ulang sampah oleh LSM Katiga.
- Studi Kelayakan Teknologi *Waste to energi* di Kota Bandung, oleh Pusat Penelitian ITB, dan lain sebagainya.

- Kajian kelayakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah oleh Pusat Penelitian Geologi Teknik, dan studi-studi lainnya.

4.1.2 Potensi Kelembagaan dan Institusi.

Potensi lain yang dimiliki oleh kawasan ini, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah keberadaan dari institusi yang menangani pengelolaan. Meskipun bentuk pengelola/institusi tersebut terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari perusahaan daerah hingga yang berbentuk Dinas namun keberadaan institusi tersebut dirasakan sangat bermanfaat karena dengan keberadaannya seluruh tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan berada pada satu tanggung jawab.

Potensi lain dari segi kelembagaan/institusi adalah dengan telah terbentuknya lembaga pengelola sampah regional Metropolitan Bandung yang bernama *Greater Bandung Waste Management Cooperation (GBWMC)* yang dilahirkan melalui keputusan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Bandung Metropolitan Bandung. Pembentukan lembaga ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi telah melalui tahapan yang cukup panjang dan melewati serangkaian pertemuan yang menghasilkan beberapa kesepakatan, dengan terbentuknya lembaga ini diharapkan segala kendala lintas batas yang biasanya terjadi dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat diatasi. Berikut adalah tahapan pembentukan GBWMC.



Gambar 4.1 Tahapan Pembentukan Pengelolaan Sampah Terpadu Metropolitan Bandung.

4.1.3 Potensi Bahan Baku Dan Potensi Pasar Hasil Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah modern seperti *waste to energi* dan pengolahan sampah organik adalah suatu bentuk pengelolaan yang bersifat seperti industri, dimana keberadaan bahan baku dan pasar untuk menjual produknya menjadi hal yang penting untuk menjamin industri tersebut berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku berupa sampah di kawasan ini sangatlah banyak. Hasil proyeksi dari jumlah penduduk di Kawasan Metropolitan Bandung

menghasilkan bahwa di tahun 2008 jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk di kawasan ini adalah sebanyak 20.515 m³/hari atau 7.487.801 m³/ tahun. Dengan asumsi tingkat pelayanan sebesar 80% maka sampah yang bisa dikelola adalah sebesar 16.411,62 m³/ hari atau 5.990.241 m³/ pertahun.

Adapun "pasar" untuk produk-produk yang dihasilkan juga masih sangat besar. Kawasan industri di Cimahi dan Kabupaten Bandung saat ini sudah mulai menggunakan batubara sebagai sumber listriknya akibat pasokan listrik dari PLN yang sangat terbatas, itu berarti pasar untuk menjual listrik dari upaya *WTE* sangatlah terbuka. Demikian juga dengan pasar untuk produk kompos. Kawasan Pertanian di selatan dan utara Kabupaten Bandung, Kawasan pertanian di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang serta gencarnya upaya rehabilitasi lahan kritis dapat menjadi potensi pasar yang luar biasa besarnya untuk produk pupuk Kompos.

4.2 Permasalahan

Selain potensi-potensi di atas, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pengelolaan persampahan di Kawasan Metropolitan Bandung juga masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih sangat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengelola sampah dan yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Berikut akan diuraikan beberapa fakta masalah tersebut.

4.2.1 Masalah prasarana persampahan.

Pengelolaan sampah sangat tergantung dari keberadaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai tempat pembuangan akhir. Semua tahapan tersebut saling bergantung satu dengan lainnya. Artinya jika tahapan sebelumnya tidak dilakukan dengan baik, maka tahapan berikutnya akan terganggu atau bahkan tidak berjalan. Sebagai contoh, jika sampah tidak diwadahi dengan baik disumbernya, maka sampah tersebut tidak bisa dikumpulkan dan tentu tidak akan terangkut untuk dibuang ke TPA.

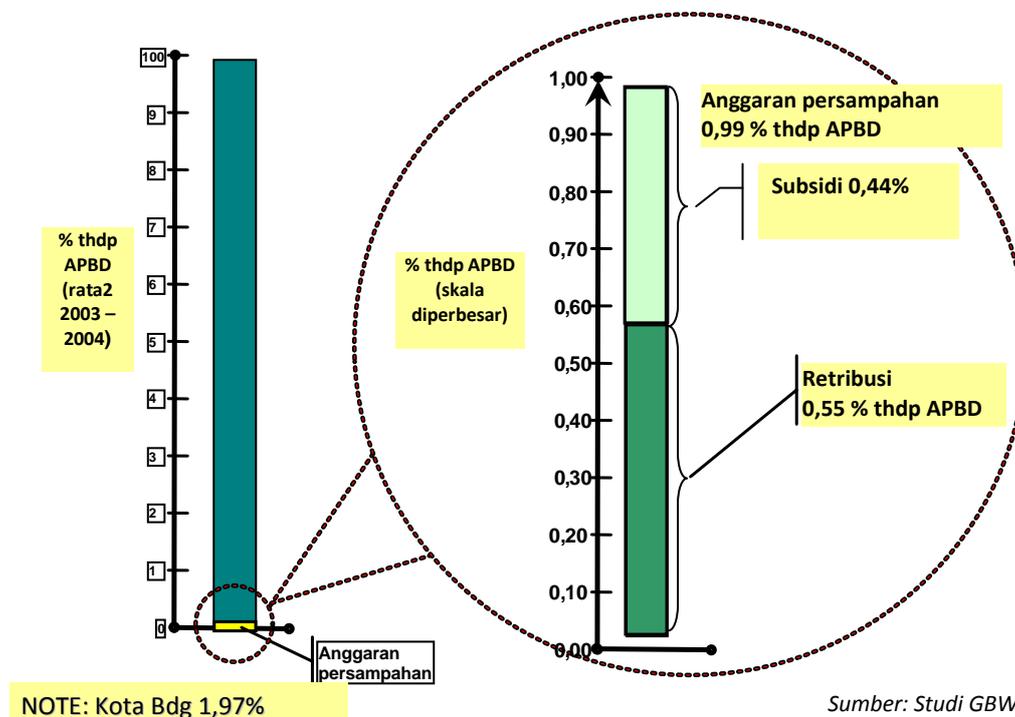


Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan Metropolitan Bandung masih sangat terbatas. Selain sistem pewadahan yang terkesan asal-asalan oleh masyarakat, sarana lainnya seperti kendaraan pengumpul sampah, truck pengangkut hingga sarana dan prasarana di Tempat Pembuangan Akhir

jumlahnya sedikit dan walaupun ada tingkat efisiensinya sudah jauh menurun akibat kerusakan atau umur pakai yang sudah lama. Sebagai contoh TPA Jelekong yang ada di Kecamatan Jelekong Kabupaten Bandung. TPA ini biasanya digunakan untuk menampung sampah dari wilayah selatan kota dan kabupaten Bandung, saat ini sudah tidak dipakai lagi karena seluruh sarana dan prasarana di TPA ini seperti alat-alat berat (*beckhoe, scrapper*), jembatan timbang dan kolam *leachate* sudah rusak dan sama sekali tidak bisa dipakai lagi.

4.2.2 Masalah anggaran

Upaya penanganan sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit : penyediaan sarana dan prasarana, biaya transportasi, biaya personil dan biaya pengelolaan di TPA adalah unsur-unsur yang ada di dalam biaya pengelolaan persampahan. Pada saat ini anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk kegiatan ini masih sangat terbatas. Anggaran yang disiapkan oleh APBD rata-rata hanya sekitar 0,99% dari total anggaran, sedangkan hasil dari retribusi baru mencapai sekitar 0,55% terhadap APBD. Berikut adalah ilustrasi anggaran persampahan terhadap APBD di kawasan Metropolitan Bandung (2003-2004).



Gambar 4.2 Perbandingan Anggaran Persampahan Vs APBD Rata-Rata Di Metropolitan Bandung

Ditinjau dari segi pembiayaan, hanya pada komponen biaya saat pengumpulan yang dilakukan oleh masyarakat saja yang sudah memadai sedangkan di komponen lain seperti di pengangkutan dan pembuangan akhir komponen biaya tersebut masih sangat rendah sehingga tingkat efisiensi pengelolaan menjadi rendah pula. Tabel berikut mengilustrasikan keadaan tersebut.

Tabel 4.1 Pembiayaan (rata-rata) Pengelolaan Sampah Metropolitan Bandung

Item	Saat Ini	Ideal	Kondisi Saat ini
Sumber → TPS (oleh masyarakat)	Rp 120.000 – Rp 180.000 / ton	Rp 120.000 – Rp 180.000 / ton	Pengumpulan sudah baik
TPS → TPA	Rp 17.600 / ton	Rp 70.000 / ton	Truk tua → efisiensi rendah
TPA	Rp 4.000 / ton	Rp 35.000 / ton (GBWMC)	Open dumping
Retribusi	Rp 2.500 – Rp 4.000 / bulan / KK	Rp 10.000 – 13.000 / bulan / KK	Pembayaran retribusi bersamaan dengan pembayaran listrik

Sumber : GBWMC 2005

4.2.3 Masalah Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai hal, diantaranya :

- Berpartisipasi aktif dalam mengurangi jumlah sampah (*reduce*)
- Melakukan upaya pemanfaatan kembali sampah menjadi benda yang bisa digunakan atau bahkan bernilai ekonomi.
- Membayar retribusi pengelolaan sampah,
- Dan lain sebagainya.

Seperti juga di kawasan perkotaan lain di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah di kota Bandung sangatlah rendah. Masyarakat hanya berperan dalam mewadahi sampah di sumbernya dan membayarkan sejumlah uang retribusi. Hal ini kemudian membuat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah menjadi sangat besar. Hal ini terbukti ketika peristiwa longsornya TPA Leuwigajah yang berdampak pada lumpuhnya pengelolaan sampah di Kota Bandung, masyarakat tampak sangat tidak berdaya sehingga sampah menumpuk dimana-mana, menjadikan kota menjadi sangat kotor dan menimbulkan penyakit dimana-mana. Berikut adalah ilustrasi kondisi Kota Bandung beberapa saat setelah longsornya TPA Leuwigajah.



Gambar 4.3 Kondisi Beberapa Titik di Kota Bandung Pasca Longsor TPA Leuwigajah

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah dapat diakibatkan oleh berbagai hal, diantaranya :

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sampah, sampah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, menjijikkan dan tidak mempunyai manfaat apapun.
- Masyarakat sering menganggap bahwa pengelolaan sampah cukup dilakukan oleh pemerintah karenanya mereka cukup hanya membayar retribusi saja.

Dua pemahaman mendasar tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Jika masyarakat memahami dan menyadari bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama, maka diyakini partisipasi masyarakat akan meningkat.